

Program Keluarga Harapan dan Kualitas Hidup: Analisis Kendala Pelaksanaan di Kabupaten Sambas

Intan Lidia Putri¹, Nurhasikin²

¹Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: intanlidiaputri@gmail.com

²Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: asihdwiningsih40@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
06-06-2023

Direvisi:
20-04-2025

Diterima:
23-04-2025

Keywords

: Family Hope Program, poverty, implementation barriers, quality of life, Sambas Regency

ABSTRACT

This study aims to analyze the obstacles in implementing the Family Hope Program (PKH) in Sambas Regency, West Kalimantan. Using a qualitative approach with data collected through interviews and documentation, the data were analyzed using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal several key barriers, including insufficient funding for data updating, a decline in the quality and quantity of PKH human resources, changes in aid disbursement locations, and difficult geographical access for coaching activities. These obstacles affect the effectiveness of PKH implementation and indirectly hinder efforts to improve the quality of life of the beneficiary communities. Therefore, evaluation, institutional strengthening, and targeted policy support are needed to optimize the program at the local level.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala utama, antara lain kurangnya dana untuk pemutakhiran data, penurunan kualitas dan kuantitas SDM PKH, perubahan lokasi pencairan bantuan, serta akses geografis yang sulit dijangkau dalam proses pembinaan. Hambatan-hambatan ini berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan PKH dan secara tidak langsung menghambat upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi dan penguatan kelembagaan serta dukungan kebijakan yang tepat sasaran untuk mengoptimalkan program ini di daerah.

Kata Kunci

: Program Keluarga Harapan, kemiskinan, hambatan implementasi, kualitas hidup, Kabupaten Sambas

Corresponding Author

: Nurhasikin, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, Desa Sebyan, Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia, e-mail: asihdwiningsih40@gmail.com

PENDAHULUAN

Angka kemiskinan yang tinggi masih menjadi salah satu masalah dalam pembangunan bagi negara Indonesia termasuk Kabupaten Sambas. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperoleh kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pakaian, dan obat-obatan (Nasikh, 2022). Minimnya kualitas hidup masyarakat miskin berdampak pada minimnya persentase pendidikan dan kesehatan yang dapat memengaruhi kualitas hidup yang dapat mengakibatkan tingginya ketergantungan masyarakat. Penduduk yang mengalami kemiskinan seperti masyarakat yang berpendapatan rendah, tidak berpendapatan tetap, dan tidak mempunyai berpendapatan sama sekali (Utomo, 2017). Kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sambas, mencerminkan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan.

Indonesia masih termasuk dalam kategori negara berkembang, di mana kemiskinan menjadi salah satu isu utama dalam permasalahan perekonomian nasional. Kondisi ini juga tercermin di daerah-daerah, termasuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sambas menunjukkan tren penurunan, yaitu sebesar 7,70% pada tahun 2020, 7,66% pada tahun 2021, dan 6,53% pada tahun 2024 (Sambas, 2025). Penurunan ini mengindikasikan adanya upaya perbaikan dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Meski demikian, angka kemiskinan tersebut tetap menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan daerah dapat dijadikan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Sambas.

Untuk menaikkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan dan program untuk agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan persentase kemiskinan melalui program keluarga harapan (PKH) (Pradina, 2019). Program Keluarga Harapan bertujuan agar aksesibilitas meningkat pada pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan penduduk supaya bisa mendukung terciptanya kualitas hidup masyarakat miskin (Esha, 2012). Pengimplementasian diperlukan pada bantuan Program Keluarga Harapan supaya masyarakat miskin mendapatkan bantuan yang sudah diprogramkan oleh pemerintah dengan terus menjaga efektivitas dan efisien dari program tersebut.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas implementasi dan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Misalnya, penelitian oleh Nandini et al. (2022) menunjukkan bahwa efektivitas PKH sangat dipengaruhi oleh validitas data penerima manfaat dan kapasitas pendamping sosial di lapangan (Nandini et al., 2022). Sementara itu, studi dari Sari dan Prasetyo (2021) menyoroti permasalahan teknis seperti keterlambatan pencairan dana dan perubahan mekanisme penyaluran bantuan sebagai hambatan yang sering muncul dalam pelaksanaan program (Sawitri & Rahmat, 2025). Penelitian lainnya oleh Rahmawati (2019) mengungkap bahwa keterlibatan aktif pemerintah daerah serta penguatan koordinasi antar instansi menjadi kunci keberhasilan implementasi PKH di tingkat lokal (Virgoreta, 2014). Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa tantangan implementasi PKH tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial dan geografis. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji hambatan yang ada agar program ini dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sambas, khususnya dari perspektif pelaksana program di lapangan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan: “Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan PKH di Kabupaten Sambas menurut pihak Dinas Sosial?” Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran nyata terhadap pelaksanaan PKH di daerah dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang berpotensi mengurangi efektivitas program. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat

menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan perbaikan implementasi program bantuan sosial. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan kajian ilmiah di bidang kebijakan publik dan kesejahteraan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif yang merupakan proses penelitian yang menciptakan data deskriptif seperti kata-kata lisan, data-data yang berhubungan dengan makna (Creswell, 2014; La Ode, 2018). Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan data yang mendalam secara lebih natural dan bagaimana agar adanya partisipasi masyarakat pada Program Keluarga Harapan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan gejala, dan peristiwa yang terjadi pada saat ini. Jenis penelitian ini digunakan untuk berfokus pada Implementasi Bantuan PKH di Kabupaten Sambas. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jalan Sukaramai, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Dipilihnya lokasi ini karena untuk melakukan wawancara, dokumentasi dan melengkapi permohonan data terkait Program Keluarga Harapan. Pengumpulan data dilakukan Kamis, 19 Mei 2023 pada pukul 09.00 WIB.

Data yang digunakan Data Primer yang merupakan data yang bersumber asli atau pertama (Zed, 2008). Teknik analisis data digunakan teknik reduksi, teknik *display* dan teknik simpulan (Miles & Huberman, 1994; Pratiwi, 2017). Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring dan menyederhanakan data hasil wawancara dan dokumentasi terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sambas, dengan fokus pada hambatan-hambatan yang diidentifikasi oleh Dinas Sosial. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut terhadap pola dan hubungan antar-temuan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menginterpretasikan data yang telah tersaji untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kendala implementasi PKH dan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Proses ini dilakukan secara interaktif dan berulang, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat valid dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat. Mekanisme Program Keluarga Harapan dimulai dari suatu perencanaan, penetapan calon peserta Program Keluarga Harapan, validitas data calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan, penetapan Kartu Penerima Manfaat PKH, penyaluran dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan, pendampingan Program Keluarga Harapan, peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen KPM Program Keluarga Harapan, pembaharuan data KPM PKH, dan perubahan kepesertaan Program Keluarga Harapan. Kriteria Penerima Manfaat PKH dibagi berdasarkan yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Program Keluarga Harapan di kelola Kementerian Sosial (Kemensos) dan pengawasan diawasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Program Keluarga Harapan mulai terlaksana pada tahun 2007 (Sri, 2013). Program Keluarga Harapan adalah program bantuan sosial untuk Rumah Tangga yang dengan memenuhi persyaratan agar mengurangi kemiskinan. Landasan hukum pemberian Program Keluarga Harapan adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Bila suatu saat calon peserta PKH melanggar dan tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, meliputi syarat kesehatan maupun syarat pendidikan, maka dari itu

bantuannya akan dikurangi, bahkan jika terus-menerus tidak memenuhi komitmennya, maka peserta tersebut akan dikeluarkan dari program. (Kementerian Keuangan, 2015)

Kelembagaan Program Keluarga Harapan tingkat pusat terdiri dari Tim Pengendali, dan unit pelaksana Program Keluarga Harapan yaitu pelaksana program dibawah naungan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Herlina, 2019). Program Keluarga Harapan untuk meminimalisir angka kemiskinan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Esha, 2012).

Tabel 1. Kriteria Kepesertaan Program Keluarga Harapan

No	Pelayanan yang diberikan	Kriteria
1	Pendidikan	Anak yang berumur 7 sampai 15 tahun dan terdaftar pendidikan
2	Kesehatan	Anak berumur 0-6 tahun, lalu ibu hamil dan nifas
3	Kesejahteraan Sosial	Lanjut usia mulai dari umur 60 tahun dan diutamakan disabilitas berat

Sumber: (Akib, 2017)

B. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan PKH di Kabupaten Sambas

Tabel 2. Jumlah KPM dan Dana PKH

Tahun	KPM	Dana	
2020	79.106	Rp.	21.081.092.000
2021	85.141	Rp.	61.166.500.000
2022	94.645	Rp.	72.105.475.000
Total	2.588.892	Rp.	154.353.067.000

Dalam tiga tahun terakhir KPM dan dana Program Keluarga Harapan terus bertambah setiap tahunnya seperti yang dipaparkan pada tabel diatas yang mana total dari tahun 2020-2022 penerima KPM sebanyak 258.889 dan dana yang sudah disalurkan dari tahun 2020-2022 sejumlah Rp. 154.353.067.000.

Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sambas, pertama kali diajukan proposalnya di Dinas Sosial pada Tahun 2013 oleh bapak Zulkibli, S.K.M. yang sekarang menjabat menjadi Kepala Bidang Pengembangan Perlindungan dan Jaminan Sosial. Program Keluarga Harapan memiliki perbedaan kategori dananya. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis meliputi Bantuan tetap dan Bantuan Komponen yang diberikan yang sudah ditentukan sebagai berikut :

1. Bantuan tetap untuk setiap keluarga
 - a. Reguler sebesar Rp. 550.000 keluarga/tahun
 - b. PKH AKSES sebesar Rp. 1.000.000 keluarga/tahun
2. Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa di Keluarga PKH
 - a. Ibu Hamil sebesar Rp. 2.400.000,-
 - b. Anak usai dini sebesar Rp. 2.400.000,-
 - c. Sekolah Dasar sebesar Rp.900.000,-
 - d. Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 1.500.000,-
 - e. Sekolah Menengah Kedua sebesar Rp. 2.000.000,-
 - f. Penyandang Disabilitas berat sebesar Rp. 2.400.000,-
 - g. Lanjut usia sebesar Rp. 2.400.000,-

Bantuan komponen diberikan maksimal untuk empat orang dalam satu keluarga.

Persyaratan penerima Program Keluarga Harapan sama dengan persyaratan nasional yang ada, dan harus masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, ada persyaratan tersebut antara lain terdaftar di DTKS sebagai keluarga miskin atau rentan, dan memenuhi kriteria seperti memiliki ibu hamil, anak kecil, anak usia sekolah, anggota keluarga dengan disabilitas berat. Berikut cara masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu :

1. Proses validasi DTKS dan verifikasi yang dimulai dari tingkat Desa atau kelurahan.
2. Aparat Pemerintah Desa atau Kelurahan melaksanakan pengamatan dan pencatatan terhadap keluarga yang ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dianggap dan dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi yang ada, meninggal dunia, pindah alamat ke luar Kabupaten Sinjai yang kesemuanya sudah perlu dikeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
3. Aparat Pemerintah Desa atau Kelurahan melaksanakan pengamatan dan pencatatan pada keluarga yang ada di Desa atau Kelurahan yang bahwa perlu diusulkan untuk bisa masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
4. Pemerintah Kelurahan dan Desa melaksanakan Mudes agar bisa menetapkan daftar keluarga yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dinilai perlu dikeluarkan dari DTKS dan Keluarga yang dianggap perlu diusulkan untuk masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
5. Setelah melaksanakan Mudes, petugas pendata yang ditetapkan oleh pemerintah Desa atau kelurahan turun kelapangan mengunjungi masing-masing keluarga yang sudah ditetapkan untuk divalidasi dan verifikasi dengan melakukan pengisian formulir penilaian yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi Kemensos yang sudah sebagaimana terlampir.
6. Setelah pengisian formulir penilaian oleh petugas pendata yang telah ditetapkan oleh pemerintah Desa/kelurahan selanjutnya data tersebut diserahkan kepada Dinas Sosial dengan melampirkan :
 - a. Berita acara Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan (dan lampirannya)
 - b. Kartu Keluarga.
 - c. *Form* Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi terkait Perubahan/Penghapusan/ Pengusulan Data DTKS.
7. Setelah usulan dari Desa dan kelurahan diterima oleh Dinas Sosial maka selanjutnya Dinas Sosial menginput satu persatu data dari formulir data ke dalam Sistem aplikasi SIKS-NG yang terkoneksi dengan Pusdatin Kemensos dan melampirkan bukti Hasil Musyawarah Desa/kelurahan.
8. Selanjutnya data diolah oleh Pusdatin Kemensos melalui *Method Proxymean Testing* (PMT). Hasil *Proxymean Testing* akan menentukan tingkatan rangking status sosial ekonomi keluarga yang diusulkan. Dengan tingkatan rangking tersebut menentukan apakah keluarga yang diusulkan untuk dikeluarkan dari DTKS benar adanya sudah bisa keluar dari pembaharuan DTKS atau tidak. Demikian pula bagi keluarga yang diusulkan untuk dimasukkan dalam DTKS apakah benar adanya untuk bisa masuk dalam pembaharuan DTKS atau tidak.
9. Hasil Finalisasi pengolahan data oleh Pusat Data dan Informasi selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial sebagai Data Terpadu Kesejahteraan sosial terbaru yang dilaksanakan dua kali dalam setahun. (Nur Lathifah,2021)

Program Keluarga Harapan dibuat agar masyarakat penerima PKH dapat memenuhi kebutuhan hidupnya namun Program keluarga Harapan ini belum tentu bisa mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Sambas. Program Keluarga Harapan ini jelas berbeda dengan bantuan sosial lainnya karena pada dasarnya bantuan sosial lainnya yang bersyarat harus miskin saja sedangkan Program Keluarga Harapan yang memiliki 5 syarat penerima dan harus masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Bantuan Program Keluarga Harapan yang tidak tepat sasaran harus mempunyai bukti yang benar dan jika penerima PKH terbukti tidak tepat sasaran maka akan ditindak lanjuti. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan evaluasi setiap bulannya melakukan pertemuan kelompok ditingkat Desa untuk penyuluhan, motivasi, dan pembinaan. Jumlah kelompok sekitar 800 dan ada rapat tingkat Kecamatan lalu Kabupaten untuk melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi dilapangan dan permasalahan anggaran.

C. Hambatan Implementasi PKH di Kabupaten Sambas

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan tentu saja memiliki hambatan-hambatan yang dapat mengganggu efektivitas pengimplementasian bantuan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sambas. Adapun beberapa hambatan dalam implementasi bantuan PKH di Kabupaten Sambas menurut Dinas Sosial yaitu :

1. Kurangnya dana untuk melakukan survei terkait pemutakhiran data Program Keluarga Harapan. Karena
2. SDM PKH menurun
SDM PKH merupakan singkatan dari Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan. SDM PKH berperan sangat penting dalam kelangsungan program Bansos PKH. Adapun pihak-pihak yang termasuk dalam SDM PKH yaitu Koordinator (korwil) Pendamping, Korkab/Korkot Supervisor dan Administrator Pangkalan data.
3. Tempat pengambilan dana yang berubah-ubah, pengambilan dana yang terkadang di Kantor Pos namun sekarang terkadang ada di rumah warga sebagai penyalurnya.
4. Akses dan Jarak yang jauh untuk melakukan pembinaan. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak akses yang sulit dijangkau untuk melakukan pembinaan terkait Program Keluarga Harapan seperti daerah pelosok yang infrastrukturnya yang kadang masih belum memadai.

Berdasarkan temuan yang telah dipaparkan, hambatan dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sambas menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala struktural dan teknis yang menghambat tercapainya tujuan program secara maksimal. Kurangnya dana untuk melakukan survei pemutakhiran data menyebabkan tidak akuratnya sasaran penerima bantuan, sehingga bantuan bisa saja tidak tepat guna. Di sisi lain, menurunnya kualitas dan jumlah SDM PKH turut memperlemah proses pendampingan dan pembinaan keluarga penerima manfaat. Perubahan lokasi pencairan dana serta jauhnya akses menuju tempat pembinaan juga menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam program ini. Hambatan-hambatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat menghambat upaya pengentasan kemiskinan yang seharusnya menjadi inti dari pelaksanaan PKH.

Kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, keberhasilan implementasi PKH sangat menentukan dalam menyediakan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya bagi keluarga miskin. Ketika pelaksanaan program tidak optimal, masyarakat rentan kehilangan kesempatan untuk keluar dari siklus kemiskinan karena kurangnya pendampingan, informasi, dan akses terhadap bantuan yang seharusnya mereka terima. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dari sisi kebijakan teknis maupun dukungan anggaran untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas program. Peningkatan kualitas hidup masyarakat hanya dapat tercapai apabila bantuan sosial seperti PKH dijalankan secara konsisten, merata, dan responsif terhadap kebutuhan serta tantangan di lapangan.

PENUTUP

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sambas merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui bantuan bersyarat, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis. Permasalahan seperti kurangnya dana pemutakhiran data, menurunnya kualitas SDM, perubahan lokasi pencairan dana, serta keterbatasan akses ke wilayah terpencil menjadi faktor penghambat utama dalam pencapaian tujuan program secara optimal. Ketidaktepatan sasaran dan lemahnya pendampingan turut memperbesar risiko kegagalan program dalam memutus rantai kemiskinan. Oleh karena itu, dibutuhkan pembenahan menyeluruh dari sisi kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan di lapangan agar PKH benar-benar mampu mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian keluarga penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, A. A. (2017). Pelaksanaan program keluarga harapan (pkh) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan puunaaha kecamatan unaaha kabupaten konawe provinsi sulawesi selatan.
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Esha, G. (2012). Pedoman PKH.
- Herlina. (2019). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN SUMBER SARI KECAMATAN SEI TUALANG RASO KOTA TANJUNGBALAI.
- Kementerian Keuangan. (2015). Kajian Program Keluarga Harapan.
- La Ode, M. E. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Binongko Wakatobi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Nandini, R., Putri, B. G. R., Setiawan, S. N., Anggraeni, F., & Fedryansyah, M. (2022). PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA RESOLUSI KONFLIK SOSIAL DI DESA GENTENG KECAMATAN SUKASARI, KABUPATEN SUMEDANG. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 74–82. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.38294>
- Nasikh, M. A. O. (2022). Pengaruh inovasi daerah terhadap kemiskinan. 18(1), 159–166.
- Pradina, A. (2019). Implementasi Program Keluarga (PKH)) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.
- Pratiwi, N. (2017). Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. 1.
- Sambas, B. (2025). Kabupaten Sambas dalam Angka 2025 (Vol. 34). BPS.
- Sawitri, N., & Rahmat, W. (2025). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaca Pengetasan Kemiskinan di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cembaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 13–13. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.200>
- Sri, S. (2013). Program Keluarga Harapan (PKH): Program Bantuan Dana Tunai Bersyarat di Indonesia. www.ipc-undp.org
- Utomo, dedy. (2017). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin. 2.
- Virgoreta, D. A. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Jawa Timur). [Sarjana, Universitas Brawijaya]. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/116893/>
- Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.